



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. WASTO, SH, MH

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 25 September 2020


WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
Drs. WASTO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19610212 198303 1 025

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	85%
2.	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	81,5
3.	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13
4.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	20%
5.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	65%
		Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	98%
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	90,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	Rp. 2.445.498.400,00	APBD
2. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Rp. 1.573.145.100,00	APBD
3. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 1.184.801.900,00	APBD
4. Program Pengembangan Standar Kompetensi	Rp. 15.223.000,00	APBD
5. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.323.783.500,00	APBD
6. Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 7.945.726.500,00	APBD
7. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Dalam Rangka Penyampaian Informasi Melalui Media	Rp. 500.000.000,00	APBD
8. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Rp. 400.383.120,00	APBD
9. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 177.500.000,00	APBD
10. Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 1.486.705.700,00	APBD
11. Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp. 28.770.801.550,00	APBD

Malang, 25 September 2020

